

**PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPH 21 TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA**

SKRIPSI



YOSEFA LEBUKAN

A31107093

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN 2011**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPH 21 TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA**

OLEH

**YOSEFA LEBUKAN
A311 07093**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Makassar

DISETUJUI OLEH:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Haliah, M.Si, Ak
19650731 199103 2 002

Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si, Ak
19581110 198710 1 001

ABSTRAK

YOSEFA LEBUKAN. *Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak PPh 21 terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara* (dibimbing oleh Dra.Hj. Haliah, M.si, Ak dan Drs. M. Crishtian Mangiwa, M.si, Ak).

Skripsi ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak yang dicerminkan dari jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, (2) Menganalisis variabel manakah yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

Untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak yang dicerminkan dari jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, maka digunakan analisis regresi linear berganda. Untuk mengetahui tingkat signifikansi antara variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 dan variabel jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilaporkan terhadap jumlah penerimaan pajak maka digunakan uji simultan F untuk mengetahui pengaruh kedua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selain itu juga digunakan uji parsial yaitu uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel independen.

Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi linear berganda yang dilakukan terhadap kedua variabel independen tersebut diperoleh hasil yakni variabel Jumlah Wajib Pajak PPh 21 berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sedangkan variabel Jumlah Surat Pemberitahuan yang Dilaporkan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21

Kata kunci: *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, jumlah Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, jumlah SPT yang Dilaporkan.*

ABSTRACT

YOSEFA LEBUKAN. *Influence the level of taxpayer compliance PPh 21 of article 21 income tax revenue in the Tax Office Primary North Makassar* (Advisor by Dra.Hj. Haliah, M.si, Ak and Drs. M. Crishtian Mangiwa, M.si, Ak).

This paper aims to (1) Knowing influence taxpayer compliance rate as reflected in the number of registered taxpayers PPh 21 and PPh 21 SPT reported on income tax revenues in the Tax Office 21 North Makassar, (2) Analyze Which variables have an influence greatest impact on income tax revenues in the Tax Office 21 North Makassar.

To analyze the influence of the level of taxpayer compliance as reflected in the number of registered taxpayers PPh 21 and PPh 21 SPT reported on income tax receipts 21 on the North Makassar tax office, then used multiple linear regression analysis. To determine the level of significance between the variable number of Income Tax Taxpayers 21 and a variable amount to the Annual report on the amount of tax revenue the simultaneous F test used to determine the effect of these two independent variables together on the dependent variable. It also used a partial test of the t test to determine the effect of each independent variable against the independent variables.

The analysis showed that based on multiple linear regression analysis conducted on two independent variables were obtained outcome variables namely 21 Number of Taxpayers Income Tax receipts negatively affect the income tax article 21 while the variable Number of Reported Notification of a positive effect on income tax article 21.

Key words: Rate Taxpayer Compliance, Income Tax Article 21, the number of Taxpayers Income Tax Article 21, the number of SPT are reported.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perkonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Negara Indonesia mengenakan pajak penghasilan atas pendapatan orang pribadi dan badan berdasarkan berbagai ketentuan. Pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran aktif rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Setiap pembayar pajak tidak langsung menerima kontra prestasi (kecuali pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah) dari pemerintah atas pemungutan pajak tersebut, berupa pelayanan kepada masyarakat, seperti kenikmatan atas rasa aman yang dirasakan oleh seluruh rakyat, karena adanya alat negara yang bertugas

untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara dan warganya yang pembiayaannya sebagian besar bersumber dari pajak yang telah dipungut oleh negara. Dengan adanya Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka wajib pajak terhadap penghasilan selalu dikenakan pungutan negara berupa pajak. Yang besar tarifnya sesuai dengan jenis barang yang dihasilkan. Karena pajak penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional, sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat.

Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak untuk diberi kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak terutangnya terhadap penerimaan pajak penghasilan yang didapat. Tetapi di dalam praktek Undang-Undang Kepabeanan tersebut masih menimbulkan dilema bagi pemerintah sebagai pemegang wewenang perpajakan dan wajib pajak masih kurang memahami isi dari surat setoran pajak, bahkan belum mengetahui dengan jelas teknik-teknik pengisian, sehingga masih terdapat anggapan yang keliru dalam pengisian surat setoran pajak. Namun sekarang ini, sikap wajib masih membawa dampak pada ketidakefektifan pelaksanaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, kemungkinan pajak yang terutang yang dilaporkan tidak lengkap dan tidak tepat sehingga merugikan kas negara. Untuk itu, wajib pajak dapat berimplikasi menurut kesadarannya dalam mematuhi peraturan perpajakan dan rasa patriotik dalam berbangsa dan bernegara agar penerimaan pajak yang setiap tahun kian meningkat.

Undang-Undang Pajak Penghasilan masih tetap berpegang pada prinsip keadilan, kemudahan serta efisiensi administrasi produktivitas penerimaan negara. Karena itu arah dan tujuan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak.
- b. Lebih memberikan kemudahan wajib pajak.
- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu.

Pola penerimaan pajak masih terdapat beberapa implikasi yaitu wajib pajak melaporkan pajak terutangnya tidak sesuai dengan jumlah pajak yang ditetapkan, wajib pajak salah dalam menghitung, menyetor, melaporkan pajak terutangnya, serta adanya kemungkinan wajib pajak menyembunyikan sebagian penghasilannya sehingga jumlah pajak yang dibayar sedikit.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara**”.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang dikaji merupakan salah satu aspek yang penting dalam penulisan skripsi ini. Pembatasan masalah dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih pembicaraan di luar sasaran yang akan dicapai. Melalui pembatasan masalah ini, penulis akan memberikan batasan pengertian tentang ruang lingkup sasaran yang akan dikaji.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan membahas pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini dicerminkan dari variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka berikut ini dirumuskan masalah dalam skripsi ini:

1. Apakah variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan yang keduanya merupakan wujud nyata dari tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21?
2. Dari kedua variabel tersebut, variabel manakah yang paling besar mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah, maka penulis menduga ada pengaruh antara jumlah wajib pajak dan jumlah surat pemberitahuan tahunan yang disetorkan terhadap penerimaan PPh 21. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Jumlah Wajib Pajak yang efektif terdaftar dan Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak PPh pasal 21.

H2 : Jumlah Wajib Pajak yang efektif terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Makassar Utara.

H3 : Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak yang dicerminkan dari jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

2. Menganalisis variabel manakah yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 21

2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang ada.

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan peraturan perpajakan yang diterapkan pada Pajak Penghasilan pasal 21 untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

3. Bagi Fakultas

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Penghasilan pasal 21.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada tulisan ini, penulis membagi penulisan menjadi 5 Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, hipotesis, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian yaitu pengertian dan fungsi pajak, teori dan asas pemungutan pajak, pengertian pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan Pasal 21, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku WP, dan surat pemberitahuan

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, mencakup daerah penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini berisi tentang Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, Keunggulan Organisasi, Sumber Daya Manusia, Pelayanan Perpajakan dan Wilayah Kerja, Struktur Organisasi Instansi dan Pembagian Tugas

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Aktif Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 21 Yang Dilaporkan Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara dan Analisis Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak PPh 21 terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari proses merangkum hasil penelitian, saran yang memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang ditulis dengan hasil atau simpulan itu sendiri baik secara praktis, teoritis dan metodologis, serta keterbatasan penelitian.

BAB VI

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

6.1 Kesimpulan

1. Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara selama 5 tahun terakhir dari tahun 2006 hingga tahun 2010 berfluktuasi dalam hal penerimaan PPh 21, dari tahun 2006 ke tahun 2007 dan tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami kenaikan penerimaan pajak dengan total Rp. 53.588.069. Sedangkan penurunan penerimaan pajak terjadi pada tahun 2007 ke tahun 2008 dan tahun 2009 ke tahun 2010 dengan total Rp. 66.087.411. selama 5 tahun tersebut total penurunan penerimaan pajak lebih besar dari pada peningkatan penerimaan pajak dengan selisih Rp 12.499.342.
2. KPP Makassar Utara selama 5 tahun terakhir dari tahun 2006 sampai 2010 belum berhasil dalam upaya peningkatan jumlah penerimaan pajak ini terlihat dari selama 4 tahun yaitu tahun 2006, 2007, 2008 dan 2010 mengalami penurunan, artinya KPP Makassar Utara belum berhasil mencapai target atau rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh DJP.
3. Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara selama 5 tahun terakhir dari tahun 2006 hingga tahun 2010 berhasil dalam program ekstensifikasi jumlah wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenaikan jumlah wajib pajak dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dengan jumlah peningkatan 58.421.

4. Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara selama 5 tahun terakhir dari tahun 2006 hingga tahun 2010 berhasil meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan dari tahun 2006 ke tahun 2010 dengan jumlah 140.372 dengan total peningkatan sebesar 30.413.
5. Peningkatan jumlah wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Makassar Utara dimana diketahui koefisien X_1 atau nilai b_1 adalah -16,32 artinya setiap peningkatan jumlah wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.
6. Ada 5 hal yang menyebabkan jumlah wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, yaitu adanya perubahan UU No. 17 Tahun 2000 menjadi UU No. 36 Tahun 2008 khususnya tentang peningkatan standar penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan penurunan tarif pajak progresif, adanya kemudahan – kemudahan yang diberikan kepada orang yang memiliki NPWP, adanya pemekaran KPP Ujung Pandang menjadi beberapa KPP pada tahun 2008 dan adanya WP baru yang belum potensial untuk membayar pajak.
7. Dari analisis tersebut juga disimpulkan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah SPT Tahunan yang disampaikan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Makassar Utara dimana diketahui koefisien X_2 atau nilai b_2 sebesar 21,13 artinya setiap

peningkatan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak atau jika SPT Tahunan yang dilaporkan meningkat maka akan diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak.

8. Dari kedua indikator tingkat kepatuhan wajib pajak PPh 21 yaitu variabel jumlah wajib pajak dan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak adalah jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan sedangkan peningkatan jumlah wajib pajak berpengaruh negatif terhadap peningkatan jumlah penerimaan pajak.

6.2 Saran

1. Disarankan kepada KPP Makassar Utara untuk lebih menggali potensi Wajib Pajak potensial yang kemungkinan mampu memberi pembayaran pajak di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Dari hasil kesimpulan di atas, maka disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara untuk memaksimalkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat khususnya sosialisasi yang berhubungan dengan cara pengisian SPT, jangka waktu pelaporan SPT serta sanksi yang diberikan jika SPT tidak disampaikan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuannya tepat waktu karena hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

3. Oleh karena jumlah SPT Tahunan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21, maka disarankan kepada KPP Makassar Utara untuk lebih mengefektifkan jumlah wajib pajak PPh 21 karena sangat berpotensi untuk meningkatkan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan yang sangat berpotensi dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.
4. Disarankan kepada KPP Makassar Utara untuk memaksimalkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sehingga tingkat kesadaran dari wajib pajak semakin meningkat.

6.3 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang kemungkinan mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut misalnya penulis hanya menggunakan atau menguji 2 (dua) variabel independen (X) saja, yaitu jumlah Wajib pajak yang terdaftar efektif dan Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilaporkan. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian yang lain untuk variabel lainnya yang mungkin menjadi indikator tingkat kepatuhan wajib pajak.